

**ANALISIS PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI TINJAU
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Muhammad Anur Ridwan

NPM : 1551030119

Jurusan: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M
ABSTRAK**

**ANALISIS PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI TINJAU
DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh
MUHAMMAD ANUR RIDWAN
NPM. 1551030119

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ANALISIS PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

Oleh :

Muhammad Anur Ridwan

Fenomena global adanya tuntutan demokrasi dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo. (2) Bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, di desa bogorejo, kecamatan gedong tataan, kabupaten pesawaran dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa (1) untuk pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengelolaan sudah baik. (2) aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat membawa perubahan yang baik di Desa Bogorejo, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.

Kata Kunci: Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Akuntabilitas, Akuntansi Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmim, Sukramane, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anur Ridwan
NPM : 1551030119
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimuklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 09 September 2019

Muhammad Anur Ridwan
NPM : 1551030119



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Satriawan, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

Nama Mahasiswa

: Muhammad Anur Ridwan

NPM

: 1551030119

Prodi

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 28 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ruslan Abdul Ghofer, M.S.I

Muhammad Iqbal, S.E.I, M.E.I

NIP: 197905142003122002

NIP: 198811042015031007

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si

NIP: 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. J. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDS) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesisir)**" Disusun oleh **Muhammad Anur Ridwan, NPM 1551030119, Prodi Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Madnasil, S.E., M.S.I.

Sekretaris : M. Filtri Nugraha Kholid, M.Pd.

Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 197005142003122002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah :119)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2012), h. 206.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda M. Ikhsan dan Ibunda Sugimah tercinta, doa tulus dan ucapan terimakasih saya persembahkan atas jasa, pengorbanan, pendidikan, penyemangat dan yang telah memberikan bekal moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Untuk adikku tercinta Muhammad Deni Mukhlis dan Muhammad Hafidz Nur Azizan yang telah memberikan semangat sebagai bentuk kontribusi selesainya skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Muhammad Anur Ridwan dilahirkan di Kota Negara, 19 Mei 1997. Putra pertama dari pasangan bapak M. Ikhsan dan Ibu Sugimah dan dari tiga bersaudara yaitu Muhammad Deni Mukhlis Dan Muhammad Hafidz Nur Azizan.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Muhajirin selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama di SMPN 3 Sungkai Utara selesai pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan sekolah lanjut tingkat atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lampung Utara selesai pada tahun 2015. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program study Ekonomi Syariah.

Selama masa studi strata satu penulis tergabung di Generasi Baru Indonesia (GenBI) komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat sebagai wakil ketua umum, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi sebagai Sekertaris.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Ekonomi Syariah.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberi izin penelitian kepada penulis.
 3. Bapak Madnasir, S.E., M.Si., Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
- Terimakasih atas petunjuk dan arahan yang telah diberikan selama masa

studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Ibu Any Eliza, M.Ak., Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Bapak Muhammad Iqbal, S.E.I.,M.E.I., Ibu Dinda Fali Rifan, M.Ak., Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa study di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bank Indonesia yang telah memberikan Beasiswa yang sangat membantu dalam proses penyelesaian masa study.
8. Bapak dan Ibu Pemerintah Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ma'had Aljamiah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempat ternyaman selama proses studi.
10. Sahabatku Baitul Jannah, Ikhsan Habib Fabillah, Edi Sudrajat, Ricky Febrian,S.Sos., Ellang Bayu Pangestu, Erwin Syaifullah, Khusnul

Khotimah, Ana Mariana, Deni Armayani, S.H., Annisa Hidayaty, M Amir Nurdin, terimakasih telah menjalin ukhuwah.

11. Sahabat seperjuangan di jurusan akuntansi syariah angkatan 2015 khususnya kelas A dan sahabat 40 Hari KKN 237 Desa Banyumas, terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jeri payah dan amal bapak dan ibu serta sahabat sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bandar Lampung, 19 Mei 2019
Penulis

Muhammad Anur Ridwan
NPM: 1551030119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Subjek Penelitian.....	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	24
B. Akuntabilitas Keuangan	25
C. Tinjauan Mengenai Desa.....	36
D. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa	52
E. Peneliti Terdahulu	60

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bogorejo	63
B. Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Bogorejo	70
C. Karakteristik Responden	72
D. Uji Keabsahan Data.....	72
E. Distribusi Hasil Jawaban Kuesioner Responden.....	74

BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo.....	79
B. Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa.....	83
C. Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.....	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh Bentuk <i>Cheklis</i>	16
Tabel 1.2 Hasil Penyebaran Kuesioner	16
Tabel 1.3 Hasil Persentase Jawaban.....	17
Tabel 1.4 Skoring Jawaban	17
Tabel 3.1 Karakteristik Responden	72
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas.....	73
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	74
Tabel 3.4 Jawaban Responden Tentang Integritas Keuangan.....	75
Tabel 3.5 Jawaban Responden Tentang Pengungkapan	76
Tabel 3.6 Jawaban Responden Tentang Ketaatan Terhadap Peraturan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Garis Kontinum.....	18
Gambar 3.1	Struktur Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran	69
Gambar 4.1	Garis Kontinum Integritas Keuangan.....	86
Gambar 4.2	Garis Kontinum Pengungkapan (<i>Full Disclosure</i>).....	91
Gambar 4.3	Garis Kontinum Ketaatan Terhadap Peraturan	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memahami skripsi ini perlu adanya ulasan atau istilah guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)” pada bagian ini akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).²

2. Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³

²Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

³Soerjono, Soekanto, *Sosioiogi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 2002), h. 243.

3. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.⁴

4. Kualitas

Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan kebutuhan masyarakat maupun pemerintah dalam sebuah penyelenggaraan.⁵

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab pengelola organisasi untuk memenuhi kepuasan pengguna jasa organisasi.⁶

6. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁷

7. Perspektif

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal.⁸

⁴Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (12 Januari 2019).

⁵Syaiful Sagala, *Human Capital* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 183.

⁶Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership (kepimpinan berbaris spiritual)* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 19.

⁷Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: Visi Media, 2016), h. 24.

⁸Yusuf Qhardawi, *Fikih Zakah Muassasat Ar-risalah*, Cet II, terjemahan Didin H.afifudin (Bairut Libanon, 1408H./1998), h. 1.

8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami,⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah mengenai kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam hal ini terkait sistem keuangan desa (SISKEUDES) yaitu peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, dalam tinjauan ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan penulis memilih judul ini karena Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dibuat sederhana dan mudah digunakan sehingganya akan memudahkan pengguna untuk mengoperasikannya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Aplikasi SISKEUDES

⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

ini sangat membantu aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.¹⁰

2. Alasan Subjektif

Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, hal ini didukung tersedianya data primer yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi dan memiliki kemudahan akses letak objek penelitian yang mudah dijangkau. Selain itu judul yang peneliti ajukan sesuai dengan program studi peneliti yaitu Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Tingginya tuntutan para *stakeholder* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik.¹¹ Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan

¹⁰Eko Febri Lusiono, Suharman, "Analisis Penerimaan Aplikasi SISKEUDES di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), h.163-172.

¹¹Setiawan, Andi, Muhtar Haboddin, dan Nila Febri Wilujeng. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 2 No.1. ISSN 2477-8060, (November, 2017), h. 17.

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.¹²

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan

¹²BPKP, *Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h. 10.

dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.¹³

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah.¹⁴ Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi.¹⁵

Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK memperoleh hasil bahwa terdapat potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari masalah tata laksana yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya mengikuti standar dan rawan manipulasi.

¹³BPKP, *Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h. 10.

¹⁴Manoppo, H., & Arie, F. V. "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. (September 2016), h. 4.

¹⁵Nyland, Kari and Pettersen, I. Johanne, "Hybrid Controls and accountabilities in public sector management. *Internasional Journal of Public Sector Management*", Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School (August 2015).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Sebelum SISKEUDES diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan implementasinya melalui pengaturan-pengaturan yang sesuai

¹⁶Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (On-Line), Tersedia di <http://www.bpkp.go.id/berita/read/18255/0/Keunggulan-Aplikasi-Siskeudes-bpkp>, (03 Oktober 2019)

dengan regulasi. aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan desktop *application* serta memiliki sistem pengendalian *intern* yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Gedong Tataan terdapat delapan belas desa, namun hanya terdapat beberapa desa yang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), salah satunya yaitu desa Bogorejo. Desa Bogorejo telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016 termasuk desa pertama yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa di Kecamatan Gedong Tataan.¹⁷ Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

¹⁷Forum desa Gedong Tataan (On-Line), tersedia di: <http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html> (29 Januari 2019)

melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan (*full disclosure*) dan ketaatan terhadap peraturan, untuk menganalisis lebih lanjut peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka dalam penelitian ini berjudul “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa, di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam tinjauan perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui Peran Aplikasi Kuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa, di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum dan ilmu akuntansi syariah khususnya.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam perspektif ekonomi islam.
- 3) Memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur ilmiah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan peran aplikasi sistem keuangan desa dan pandangan ekonomi Islam terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sehingga masyarakat khususnya pemerintah desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan guna beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digital dan memanfaatkannya dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, tidak sebatas memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga sebagai sarana

pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁸ Penelitian ini pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkaitan dengan peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan

¹⁸Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21.

hipotesis.¹⁹ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini data diperoleh dari:

- 1) Hasil wawancara dari objek penelitian yaitu Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk mengetahui proses penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan gambaran mengenai persepsi, pengetahuan dan kendala penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.
- 2) Kuesioner yang dibagikan kepada Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat desa lainnya.

¹⁹Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 130.

²⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 44.

Untuk memperoleh data mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Kepala Desa Bogorejo, mulai dari buku-buku, jurnal, artikel, dan data monografi desa Bogorejo.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²² Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat tentang sesuatu yang berhubungan dengan peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa yang diterapkan di Desa Bogorejo.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penelitian dilakukan dengan studi pendahuluan untuk menemukan

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

²²*Ibid.*, h. 138.

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²³ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁴ Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung melakukan tanya jawab dengan responden). Dalam penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban diantara beberapa opsi pilihan yang diberikan. Adapun skala yang dipakai adalah skala Likert.²⁵ Skala Likert yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 130.

²⁴ *Ibid.*, h. 142.

²⁵ *Ibid.*, h. 194.

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

Tabel 1.1
Contoh Bentuk Checklist

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Aplikasi siskeudes menyajikan laporan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005					

Sumber: Data primer yang diolah Februari 2019

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 50 orang responden dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Penyebaran Kuesioner

Jumlah Responden	Jawaban Responden
10 Orang	Sangat Setuju
20 Orang	Setuju
5 Orang	Netral
5 Orang	Tidak Setuju
10 Orang	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data primer yang diolah Februari 2019

Data dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut: $P = F/n \times 100$ (keterangan: dimana P adalah presentase, F adalah jumlah jawaban responden, n adalah sampel).

Tabel 1.3
Hasil Presentase Jawaban

Jawaban Responden	Jumlah Responden (F)	Sampel (n)	(%)	Presentase (P)
SS	10	50	100%	20%
S	20	50	100%	40%
N	5	50	100%	10%
TS	5	50	100%	10%
STS	10	50	100%	20%

Sumber: Data primer yang diolah Februari 2019

Berdasarkan data tersebut 20 orang atau 40% responden menjawab setuju. Jadi kesimpulannya mayoritas responden setuju jika Aplikasi siskeudes menyajikan laporan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden.

Tabel 1.4
Skoring Jawaban

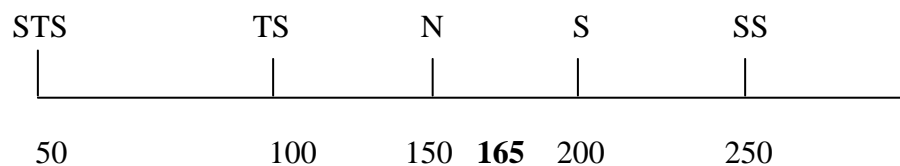
Jawaban Responden	Skoring	Jumlah Responden (F)	Hasil
SS	5	10	50
S	4	20	80
N	3	5	15
TS	2	5	10
STS	1	10	10
Jumlah Total			165

Sumber: Data primer yang diolah Februari 2019

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item $5 \times 50 = 250$ (seandainya semua menjawab SS). Jumlah yang diperoleh dari penelitian 165. Jadi berdasarkan data diatas maka tingkat persetujuan adalah $(165:250) \times 100\% = 66\%$.

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Garis Kontinum



Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 50 responden maka rata-rata 165 terletak pada daerah mendekati setuju.

d. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁶

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data di kumpulkan melalui tahapan diatas, untuk langkah-langkah dalam mengolah data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

mungkin.²⁷ Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²⁸ Teknik ini merupakan teknik kedua setelah pemeriksaan data, yaitu untuk memudahkan dalam memahami peran aplikasi sistem keuangan desa di desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan teknik ini, diharapkan dapat menggambarkan tentang bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

c. *Interprestasi*

Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁹ Interpretasi dalam penelitian ini berkaitan dengan peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

²⁷Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 153.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 154.

²⁹Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 2010), h. 18.

5. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas ialah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Data dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.³⁰ Dalam melakukan uji validitas, peneliti akan menggunakan metode komputersasi SPSS 16.

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total atau instrumen dinyatakan valid bila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas artinya alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda.³¹ Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket (kuesioner) penelitian.

³⁰Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 2006), h. 49.

³¹*Ibid.*, h. 45.

Pada program SPSS 16, metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah metode *Cronbach's alpha* yaitu ukuran dari konsistensi internal, seberapa dekat terkaitnya himpunan item sebagai sebuah grup. *Cronbach's alpha* membantu memberikan bukti bahwa skala yang dipertanyakan bersifat unidimensi.³² Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai cronbach's alpha $> 0,06$ maka angket atau kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten.
- 2) Sementara jika nilai cronbach's alpha $< 0,60$ maka angket atau kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat memberi arti makna yang berfungsi dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu analisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam sebatas keterangan-keterangan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan berbagai macam (*triangulasi*). Setelah diperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan dilanjutkan dengan mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis

³²Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi 4* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 181.

data tersebut. Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan yang diperoleh dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini diselesaikan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir Induktif. Pendekatan berfikir induktif merupakan cara untuk mengambil kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum.³³

Data yang diperoleh dari wawancara akan dipaparkan dalam bentuk naratif deskriptif dan dianalisis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan kesesuaian lapangan, dengan metode deduktif maupun induktif. Sedangkan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka akan dianalisa dengan metode statistik sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga akan menghasilkan penelitian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan standar-standar penelitian.

G. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. untuk peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi

³³Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 32.

tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pada penelitian ini sampel yang di ambil bersifat kecil. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁵ yang diambil menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai informan dalam tema penelitian. Sedangkan dalam menentukan informan, dapat menggunakan model *snow ball* sampling untuk memperluas subjek penelitian. Penelitian kualitatif lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan. Subjek dalam penelitian ini yaitu perangkat desa mulai dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun. Alasan peneliti fokus pada Perangkat Desa karena pejabat desa yang menjalankan dan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

³⁴*Ibid.*, h. 26.

³⁵Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 56.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Smith 1984 dalam Muhammad Ismail teori agen merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.³⁶ Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/*agents*/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

³⁶Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widagdo, Agus Widodo, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 2 (Januari 2016), h. 6.

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.³⁷ Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 adalah akuntabilitas.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.³⁸ Sedangkan Menurut Penny

³⁷Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 28.

³⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h. 3.

Kusumastuti akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.³⁹

Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu kendala atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Ghartey bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.⁴⁰ Dari

³⁹Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), h. 2.

⁴⁰J.B. Ghartey, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 308.

tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bisa segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

3. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:⁴¹

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

⁴¹LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN, 2000), h. 43.

4. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas dibedakan dalam beberapa jenis, menurut Mardiasmo membagi akuntabilitas menjadi dua jenis yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.⁴²

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut.

⁴²Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), h. 21.

5. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas dibagi dalam beberapa bentuk dimensi, Mahmudi membagi dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah:⁴³

1) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

2) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

⁴³Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: YKPN, 2013), h. 9.

3) Akuntabilitas produk pelayanan publik

Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

b. Akuntabilitas Manajerial (*Managarial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada *costumer*. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial, indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Peran yang Jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.

⁴⁴Khan, Muhammad Akram, "The Role of Government in the Economy". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14 No. 2 (Jakarta 2012), h. 155.

2) Harapan dan Kinerja yang Jelas

Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.

3) Pelaporan Kredibel

Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

4) Ulasan Wajar dan Penyesuaian

Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan artian akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi harusnya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan

tujuan organisasi. Indikator akuntabilitas program menurut Abdul Halim adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Hasil dari program yang dijalankan
- 2) Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program
- 3) Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program

d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa yang menjadi sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut. Indikator akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) menurut Elwood adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)

Menunjukan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.

⁴⁵Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 20.

⁴⁶Elwood S, *Manajemen Operasi dan Produksi Modern* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2003), h. 21.

2) Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)

Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok *clien/customer* dan *stakeholders* dalam masyarakat.

3) Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)

Menunjukan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil jika dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

e. Akuntabilitas Keuangan

Laporan keuangan yang akuntabel menurut konsep *Good Governance* adalah laporan keuangan yang memenuhi tiga unsur, yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen tersebut.

1) Integritas Keuangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain,

integritas keuangan mencerminkan keterpaduan dan kejujuran penyajian laporan keuangan. Agar laporan keuangan dapat diandalkan, kualitas informasi yang terkandung di dalamnya harus menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksud untuk dinyatakan. Keandalan menurut FASB adalah suatu fungsi dari kejujuran penyajian, dapat diperiksa, dan netralitas.

Jika seseorang tergantung pada informasi, sangat penting bagi informasi tersebut untuk melaporkan secara jujur fenomena yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Menurut Kieso dan Weygandt maksud dari kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya.⁴⁷ Menguji sesuatu berarti menetapkan kebenarannya. Kebenaran tampaknya menyiratkan bahwa pengukuran berada terpisah dari orang yang membuat pengukuran. Khususnya dalam akuntansi, pertanyaan pentingnya adalah apakah pengukuran dapat independen dari pengukur atau tidak. Pengukuran-pengukuran dapat diuji jika hal itu dapat didukung oleh konsensus intersubjektif dari para pakar yang memenuhi syarat.

Untuk memastikan integritas keuangan terjadi dalam laporan keuangan, organisasi memerlukan beberapa cara untuk memastikannya, melalui pengujian dan pemeriksaan laporan keuangan

⁴⁷Kieso, Weygandt, *Intermediate Accounting : Akuntansi Intermediate*. Diterjemahkan Herman Wibowo. Ed. V, Jilid 1 (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), h. 20.

baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal organisasi, menyediakan sistem pengawasan pengelolaan organisasi dan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud disini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Suatu audit meliputi pemeriksaan, pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan keuangan yang diperiksanya, ini berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan penyajian telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Pihak intern organisasi juga perlu membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memonitoring secara mudah dan efektif atas sistem internal kontrol atas berjalan tidaknya operasi secara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk menjamin penggunaan dana secara efektif dan efisien, organisasi memerlukan sistem anggaran yang setiap tahun dievaluasi untuk mengetahui apakah target tercapai, melebihi atau dibawah target. Dan juga dapat

diketahui berapa persen penyimpangan yang terjadi dari rencana yang tersusun.

2) Pengungkapan (*Full Disclosure*)

FASB berpendapat bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengertian yang memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta mau mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang sewajarnya. Hal ini membutuhkan suatu pengungkapan data keuangan serta informasi relevan lainnya yang tepat. Pengungkapan menurut akuntan Hendriksen dan Van Breda yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan.⁴⁸

Tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan adalah pengungkapan yang memadai (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Pengungkapan yang memadai menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. Pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu tujuan etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon pembaca. Pengungkapan lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan informasi yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seharusnya memadai, wajar, dan

⁴⁸Hendriksen, Van Breda, *Teori Akunting* (Batam: Interaksara, 2000), h. 429.

lengkap untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik.

3) Ketaatan terhadap peraturan perundangan

Para pengelola organisasi harus mentaati semua peraturan perundangan yang ada, hal ini untuk mendorong pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Menurut Joko Widodo standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal (*controller eksternal*) kepada orang yang bertanggung jawab. Pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan badan-badan pemerintah, dan jika perorangan atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.⁴⁹

Agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik, masing-masing agensi membuat prosedur setiap transaksi dan mengikuti secara wajar dan adil, tanpa melihat karakteristik kepentingan *clients* secara individual dalam transaksi tersebut. Prosedur tersebut merupakan sarana penting bagi mereka sendiri untuk menjamin akuntabilitas, sesuai dengan poin-poin yang ada dalam pemeriksaan dan perhitungan anggaran keuangan.

⁴⁹Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (Malang: Citra, 2001), h.156.

C. Tinjauan Mengenai Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁰

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁵¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁵²

⁵⁰Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

⁵¹R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 5.

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h. 2.

Pengertian Desa menurut Paul H. Landis adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam Nyoman Beratha adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.⁵³

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

⁵³Beratha, I Nyoman, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982), h. 27.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1.

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan delegasi dari pemerintahan pusat ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola, Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan sebagai pemberi kebijakan.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.⁵⁶ Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁷

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tersendiri. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka peran kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan untuk penguatan otonomi menuju kemandirian.

Dari berbagai pengertian mengenai desa di atas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan

⁵⁶Candra Kusuma, et. al. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6 (Desember 2015), h. 4.

⁵⁷Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6.

mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga dibutuhkan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:⁵⁸

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa,

⁵⁸Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Mendapatkan sumber pendapatan,

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa,
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,
- c. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun,
- d. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,

- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Struktur Pemerintah Desa

Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD juga harus ditetapkan dengan keputusan kepala desa sehingga dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tanggung jawab yang mengikat, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.⁵⁹

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa,
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa,
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan

⁵⁹Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4.

secara berturut- turut atau tidak secara berturut- turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa,
- 2) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa,
- 3) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes,
- 4) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur)

1) Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan

Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2) Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Tugas pokok kepala urusan keuangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

3) Kepala Urusan (Kaur) TU dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

d. Kepala Seksi

1) Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

2) Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

3) Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kelembagaan Masyarakat Desa

Di dalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas:

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa,
- 2) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
- 3) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa,
- 4) Menyusunrencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
- 5) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga,
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan serta mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

3. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan

pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW.Widjaja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁶⁰

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:⁶¹

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 212 Ayat (1).

⁶¹Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1).

- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota.⁶² Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana

⁶²Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1).

program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak tersebar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian atau Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian atau Lembaga bisa dialokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti di atas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi dominan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.⁶³

⁶³Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁶⁴ Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁶⁵

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:⁶⁶

a. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

⁶⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (5).

⁶⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (6).

⁶⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1).

b. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

D. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

1. Sejarah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan

pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.⁶⁷

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.⁶⁸

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database

⁶⁷Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (12 Januari 2019).

⁶⁸Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (12 Januari 2019).

SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

2. Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa,⁶⁹ dengan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan :

- 1) Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.

⁶⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, Pasal 2.

2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

b. Ruang Lingkup :

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:⁷⁰

a. Tingkat Pemerintahan:

1) Pemerintah Pusat:

- a) Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.
- b) Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian.
- c) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.

2) Pemerintah Provinsi:

- a) Pembinaan dan Pengawasan
- b) Fasilitasi pendampingan

3) Pemerintah Kabupaten/Kota:

⁷⁰Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (12 Januari 2019).

- a) Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah
 - b) SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD))
 - c) Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 4) Pemerintah Desa:
- a) SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - b) Sarana dan Prasarana Desa
 - c) Kebijakan tingkat Desa

3. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan:

- 1) Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT.
- 3) Kualitas RKP Desa

b. Penganggaran:

- 1) Penyusunan APB Desa
- 2) Harmonisasi Kepala Desa & BPD

3) Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan

c. Pelaksanaan:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Kewajiban Perpajakan
- 3) Kewenangan Kepala Desa yang besar

d. Penatausahaan:

- 1) Administrasi pembukuan
- 2) Cara peng-SPJ-an
- 3) Pencatatan kekayaan desa
- 4) Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

- 1) Jumlah Laporan yang harus dibuat
- 2) Standar Pelaporan

f. Pengawasan :

- 1) Efektifitas pengawasan
- 2) Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota

4. Kelebihan dan Fitur-Fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi sisitem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku,
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
- c. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,

- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
- f. Kesenambungan *maintenance* karena merupakan aplikasi resmi pemerintah,
- g. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:⁷¹

- a. Dokumen Penatausahaan,
- b. Bukti Penerimaan,
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- d. Surat Setoran Pajak (SSP),
- e. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana),
- f. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.

⁷¹Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (12 Januari 2019).

5. Dasar Hukum Aplikasi Sistem Keuangan Desa

- a. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. PP Nomor 43 tahun 2014 juncto PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. PP Nomor 60 tahun 2014 juncto PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- f. PMK Nomor 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

E. Konsep Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Makna yang terkandung dalam ketiga prinsip akuntansi syariah tersebut adalah :

1. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*).

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan

pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan yang telah diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam Al'Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika / syariah dan moral).

3. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan

menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.⁷²

F. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sesuai peneliti jadikan sebagai dasar dan acuan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:

1. Peneliti Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muclis dan Reski Amalia Putri, dengan judul “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa, Kec. Palangga Kab. Gowa)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggung jawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.⁷³
2. Peneliti Gustin Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni dan Putu Sukma Kurniawan, dengan judul “Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap pemerintah Desa”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari

⁷²Sri Dewi Anggadini, “Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah”, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol.8, No. 2, h. 136

⁷³Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muclis, Reski Amalia Putri, “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2018), h. 22.

hal tersebut maka penerapan SISKEUDES memiliki peran yang sangat penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dieasakan langsung oleh para pegawai desa di desa Kaba-kaba, Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.⁷⁴

3. Peneliti Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widagdo dan Agus Widodo, dengan judul “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”, Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2015. Hal ini ditambah lagi belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantun pengelolaan dana desa.⁷⁵
4. Peneliti Bandiyah, dengan judul “Mengukur Akutabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Sebagai Implementasi PP NO.47 Tahun 2014 di Kabupaten Badung dan Tabanan 2017”, Hasil Penelitian menunjukan seara akuntabilitas keuangan desa belum menunjukan akuntabel dalam pembuatan laporan keuangan, publikasi dana desa dan pengawasan, sedangkan berdasarkan akuntabilitas sosial juga belum akuntabel karena pelibatan masyarakat hanya dilakukan perwakilan di tingkat musyawarah desa,

⁷⁴Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan, “peranan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa”. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), h. 5.

⁷⁵Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widagdo, Agus Widodo, “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 2 (Januari 2016), h. 18.

sehingga masih banyak masyarakat yang belum tau tentang dana desa dan programnya.⁷⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini objek penelitian berfokus pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dalam tinjauan ekonomi Islam. Sedangkan persamaannya adalah menekankan pada sistem dan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik (*good village governance*).

⁷⁶Bandiyah, “Mengukur Akutabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Sebagai Implementasi PP NO. 47 Tahun 2014”. *Jurnal Fakultas Teknologi informasi*, ISSN : 2598-0076 (Agustus 2018), h. 4.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bogorejo

1. Visi dan Misi Desa Bogorejo

a. Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang lebih baik guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Pembangunan yang merata di seluruh wilayah kedesunanan sesuai kebutuhan,
- 2) Penataan ulang kelembagaan dan aparatur desa melalui penciptaan etos kerjayang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang professional, tertib administrasi dan keuangan,
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia,
- 5) Meningkatkan hasil perekonomian dan taraf kesehatan masyarakat,
- 6) Meningkatkan peran pemuda melalui Karang Taruna, Risma, dan organisasi kepemudaan lainnya,
- 7) Menumbuhkan kewirausahaan untuk menciptakan ekonomi kreatif,
- 8) Meningkatkan pemberdayaan perempuan,
- 9) Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui majlis-majlis ta'lim agar tercipta ukhuwah islamiyah.

2. Sejarah Singkat Desa Bogorejo

Desa Bogorejo awalnya merupakan sebuah Dusun dari beberapa Dusun lainnya yang berada dalam desa di Gedong Tataan. Desa Bogorejo menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri menjadi sebuah desa. Selanjutnya keinginan masyarakat tersebut ditampung dan dibahas oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam suatu rapat dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Kemudian setelah semua sepakat menjadi suatu tekad, hal tersebut disampaikan pada saat rapat desa di Gedong Tataan. Setelah disetujui oleh LMD Desa Gedong Tataan, kemudian diteruskan ke Kabupaten melalui Camat Gedong Tataan.⁷⁷

Pada tanggal 26 Maret 1987, Dusun Bogorejo disetujui untuk menjadi Desa Persiapan dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/082/B.III/HK/1987, dan sebagai Pjs. Kepala Desa adalah M.Suradi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Gedong Tataan. Akhirnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/272/B.III/HK/1991 tanggal: 12 Juli 1991 Desa Persiapan Bogorejo disahkan menjadi Desa Definitif dengan Pjs Kepala Desa Bapak M. Suradi.⁷⁸

⁷⁷Dokumentasi Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, 2018.

⁷⁸Dokumentasi Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, 2018.

3. Kondisi Geografis Desa Bogorejo

Desa Bogorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Desa Bogorejo adalah 80 Ha Pemukiman Umum, 0,16 Ha Perkantoran, 3,6 Ha Sekolah, 0,3 Ha Tempat Peribadatan, 2,5 Ha Makam, 6 Ha Jalan, dan 132 Ha lain-lain.

Desa Bogorejo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Sungai/Sukaraja
2. Sebelah Selatan : Tahura Wan Abdul Rahman
3. Sebelah Barat : Sungai/Sukadadi/Gedong Tataan
4. Sebelah Timur : Sungai/Sukaraja/PTPN/Kebagusan

Iklim Desa Bogorejo sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung baik terhadap pola tanam dan kehidupan warga masyarakat di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan. Desa Bogorejo merupakan desa atau kelurahan yang memiliki kondisi yang cukup rapi dimana sebagian besar akses jalan sudah beraspal. Untuk jarak Desa Bogorejo ke Ibu kota Kecamatan hanya 4 km sedangkan jarak ke Ibu kota Kabupaten Pesawaran Lebih dekat yaitu 3 km dan jarak Desa Bogorejo ke Ibu kota Provinsi Lampung 30 km, diukur dengan berdasarkan alat transport yang di gunakan masyarakat umum di Desa/Kelurahan. untuk waktu tempuh ke Ibu kota Kecamatan 15 menit, 15 menit waktu tempuh ke Ibu kota Kabupaten dan 30 menit ke Ibu kota Provinsi.

4. Kondisi Demografi Desa Bogorejo

Jumlah Penduduk di Desa Bogorejo terdiri dari 4668 jiwa dengan 1370 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian pembagian 2362 penduduk Laki-Laki dan 2306 penduduk Perempuan.⁷⁹

5. Kondisi Sosial Desa Bogorejo

a. Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani perlu disiapkan dari usia dini, maka untuk itu kegiatan posyandu memiliki peran penting dalam hal itu kesiapan kader, pamong desa dan bidan desa sudah menagadakan kegiatan secara teratur.

1) Data usia subur dan peserta KB aktif adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan usia subur di bawah 20 tahun : 42 orang
- b) Pasangan usia subur 20 – 29 tahun : 506 orang
- c) Pasangan usia subur 30 – 40 tahun : 295 orang
- d) Pasangan KB aktif : 671 orang

2) Selain poskesdes yang di kelola oleh bidan desa, Desa Bogorejo juga mempunyai : Posyandu 5 tempat (untuk lansia dan balita), yaitu :

- a) Posyandu Mawar
- b) Posyandu Dahlia
- c) Posyandu Melati
- d) Posyandu Anggrek
- e) Posbindu 1 Buah (Untuk lansia)

⁷⁹Dokumentasi Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, 2018.

b. Kesejahteraan Sosial

1) Status sosial

- a) Jumlah keluarga pra sejahtera : 795 KK
- b) Jumlah keluarga sejahtera I : 289 KK
- c) Jumlah keluarga sejahtera II : 151 KK
- d) Jumlah keluarga sejahtera III : 135 KK

2) Sarana pendidikan

- a) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) : 2 Buah
- b) TK (Taman Kanak - Kanak) : 1 Buah
- c) SD (Sekolah Dasar) : 3 Buah
- d) SMP (Sekolah Menengah Pertama): 1 Buah

3) Sarana ibadah

- a) Masjid : 8 Buah
- b) Mushollah : 5 Buah

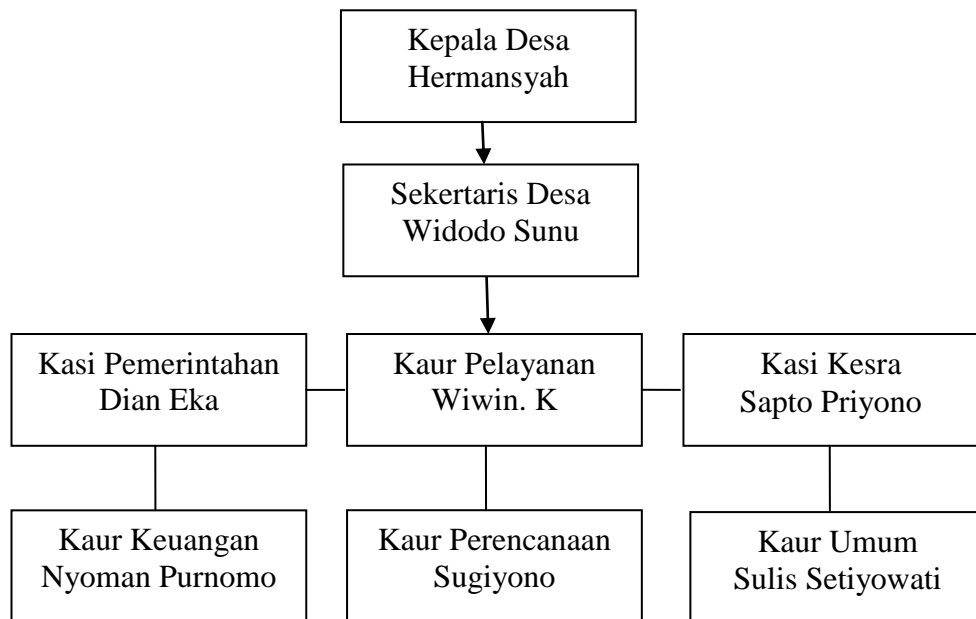
4) Kesenian dan kebudayaan

- a) Hadroh : 1 Grup
- b) Mawalan : 6 Grup
- c) Kuda kepang : 1 Grup
- d) Sanggar tari : 1 Buah

5. Struktur Pemerintahan Desa Bogorejo

a. Struktur Desa Bogorejo

Gambar 3.1
Struktur Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran



Sumber : Monografi Desa Bogorejo

b. Daftar Kepala Dusun Desa Bogorejo

- 1) Kepala Dusun Bogorejo 1 : Purwanto
- 2) Kepala Dusun Bogorejo 2 : Radisan
- 3) Kepala Dusun Bogorejo 3 : Rizal E.
- 4) Kepala Dusun Bogorejo 4 : Sutiyo
- 5) Kepala Dusun Bogorejo 5 : Samin
- 6) Kepala Dusun Bogorejo 6 : Maryono
- 7) Kepala Dusun Bogorejo 7 : Sarmin
- 8) Kepala Dusun Bogorejo 8 : Wagiman

6. Potensi Wilayah Desa Bogorejo

a. Potensi Sumber Daya Alam

Penggalian potensi sumber daya alam Desa Bogorejo akan lebih dapat dimaksimalkan melalui program peningkatan kapasitas masyarakat supaya masyarakat lebih cerdas mengelola dan meningkatkan hasil serta mampu membaca peluang-peluang usaha yang tersedia.⁸⁰

b. Potensi Wisata

1) Air Terjun

Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat 2 lokasi wisata air terjun yang masih alami dan belum dikelola oleh pemerintah desa setempat.

2) Bumi Perkemahan

Bumi perkemahan adalah tempat yang digunakan untuk tempat berkumpulnya acara pramuka, Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memiliki tempat untuk perkemahan yang sudah dikelola oleh pemerintah desa.⁸¹

⁸⁰Dokumentasi Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, 2018.

⁸¹Dokumentasi Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, 2018.

B. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo

Sudah seharusnya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu merujuk pada Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 6 November 2015 dan Dirjen Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah memerintahkan seluruh desa untuk menggunakan aplikasi ini pada tanggal 27 November 2015.⁸²

Surat tertanggal 14 Maret 2017 Nomor: 414.1/12221/IV.15/III/2017 perihal penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di tujukan kepada seluruh Camat di Kabupaten Pesawaran di tanda tangani Sekretaris Daerah Ir. Kesuma Dewangsa, MM. menekankan agar camat memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya masing-masing agar pada tahun 2017 menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga memudahkan dalam hal Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa.⁸³

⁸²Forumdesa Gedong Tataan (On-Line), tersedia di: <http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html> (29 Januari 2019)

⁸³Forumdesa Gedong Tataan (On-Line), tersedia di: <http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html> (29 Januari 2019)

Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Gedong Tataan terdapat delapan belas desa, namun hanya terdapat beberapa desa yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Salah satunya yaitu desa Bogorejo, Desa Bogorejo telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tahun 2016, dan merupakan desa pertama yang menerapkan sistem ini di Kecamatan Gedong Tataan, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo sendiri berdasarkan hasil pra riset menurut bapak Widodo Sunu selaku Sekertaris Desa Bogorejo telah diterapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo sejak tahun 2016 lalu, namun baru turun surat pemberitahuan dari kecamatan setelah hampir satu tahun Desa Bogorejo menerapkan aplikasi ini dan termasuk desa pertama yang menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Gedong Tataan.⁸⁴

Pengelola atau pengendali sistem keuangan desa ini adalah Sekertaris Desa Bogorejo dan dibantu oleh kaur keuangan Desa Bogorejo, namun untuk pelaporan tetap kembali kepada Sekertaris Desa. Desa Bogorejo sendiri telah menggunakan Aplikasi Keuangan Desa yang terbaru yaitu versi V (lima). Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini tidak terlalu berpengaruh karena sebelumnya telah diberi pelatihan-pelatihan terkait sumber daya manusia sebagai pengelola.⁸⁵

⁸⁴Widodo Sunu, wawancara dengan penulis, Kantor Kepala Desa Bogorejo, Pesawaran, 11 Desember 2018.

⁸⁵Widodo Sunu, wawancara dengan penulis, Kantor Kepala Desa Bogorejo, Pesawaran, 11 Desember 2018.

C. Karakteristik Responden

Tabel 3.1
Karakteristik Responden

NO	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Hermasyah	Kepala Desa	Laki-Laki	SLTA
2	Widodo Sunu	Sekretaris Desa	Laki-Laki	SLTA
3	Dian Eka	Kasi Pemerintah	Laki-Laki	SLTA
4	Sapto Priyono	Kasi Kesejahteraan	Laki-Laki	SLTA
5	Wiwin Kurniawati	Kasi Pelayanan	Perempuan	SLTA
6	Nyoman Purnomo	Kaur Keuangan	Laki-Laki	SLTA
7	Sugiyono	Kaur Perencanaan	Laki-Laki	SLTA
8	Sulis Setiawati	Kaur TU dan Umum	Perempuan	SLTA
9	Purwanto	Kepala Dusun 01	Laki-Laki	SLTA
10	Radisan	Kepala Dusun 02	Laki-Laki	SLTA
11	Riza E.	Kepala Dusun 03	Laki-Laki	SLTA
12	Sutyono	Kepala Dusun 04	Laki-Laki	SLTA
13	Samin	Kepala Dusun 05	Laki-Laki	SLTA
14	Mayono	Kepala Dusun 06	Laki-Laki	SLTA
15	Sarmin	Kepala Dusun 07	Laki-Laki	SLTA
16	Wagiman	Kepala Dusun 08	Laki-Laki	SLTA

Sumber: Data primer yang diolah Februari 2019

D. Uji Keabsahan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk uji validitas ini adalah bivariate pearson (produk momen pearson) dengan taraf signifikansi 0,05 dilakukan dengan mengorelasi skor masing-masing item dengan skor totalnya. Kemudian

nilai korelasi (r hitung) yang telah diperoleh dibandingkan dengan nilai korelasi pada tabel (r tabel). Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel artinya variabel dapat dinyatakan valid. Nilai r tabel yaitu $df = (n-2)$ di mana $N=16$ yaitu : $16-2=14$, dan $\alpha=5\%$ adalah sebesar 0,497.

Hasil uji menggunakan bantuan program IBM SPSS 16. Adapun hasil output perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig	kesimpulan
Integritas keuangan	P1.1	0,643	0,497	0,000	Valid
	P1.2	0,741	0,497	0,000	Valid
	P1.3	0,717	0,497	0,000	Valid
	P1.4	0,858	0,497	0,000	Valid
Pengungkapan (<i>full disclosure</i>)	P2.1	0,632	0,497	0,000	Valid
	P2.2	0,645	0,497	0,000	Valid
	P2.3	0,859	0,497	0,000	Valid
	P2.4	0,792	0,497	0,000	Valid
	P2.5	0,543	0,497	0,000	Valid
	P2.6	0,559	0,497	0,000	Valid
	P2.7	0,895	0,497	0,000	Valid
Ketaatan Terhadap Peraturan	P3.1	0,630	0,497	0,000	Valid
	P3.2	0,750	0,497	0,000	Valid
	P3.3	0,568	0,497	0,000	Valid
	P3.4	0,873	0,497	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah Maret tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, secara keseluruhan item pernyataan pada variabel integritas keuangan, pengungkapan (*full disclosure*) dan ketaatan terhadap peraturan dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0,497.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dengan kriteria bahwa tingkat *alpha* hitung lebih besar dari koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat *alpha* dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0. Adapun hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS di bawah ini.

Tabel 3.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Integritas Keuangan	0,721	0,600	Reliabel
Pengungkapan (<i>full disclosure</i>)	0,831	0,600	Reliabel
Ketaatan Terhadap Peraturan	0,637	0,600	Reliabel

Sumber: Data primer diolah Maret tahun 2019

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 3.3 diperoleh hasil perhitungan koefisien *Cronbach Alpha* > 0,600. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur dan semua pernyataan dalam penelitian ini adalah reliabel.

E. Distribusi Hasil Jawaban Kuesioner Responden

Untuk memperoleh data mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa melalui penyebaran kuesioner atau angket sebanyak 15 butir pernyataan untuk 16 responden. Berdasarkan sebaran kuesioner atau angket yang telah penulis lakukan distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket adalah sebagai berikut:

1. Integritas Keuangan

Tabel 3.4
Jawaban Responden Tentang Integritas Keuangan

	Jawaban Responden									
	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1.1	6	37,50	9	56,25	1	6,25	0	0	0	0
P1.2	2	12,50	10	62,50	4	25,00	0	0	0	0
P1.3	5	31,25	5	31,25	6	37,50	0	0	0	0
P1.4	1	6,25	7	43,75	5	31,25	3	18,75	0	0

Sumber: Data primer yang diolah Maret 2019

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Berdasarkan tabel 3.4 yaitu deskripsi responden mengenai integritas keuangan, untuk pernyataan SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 56,25%, kemudian pernyataan SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 62,50%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu melampirkan bukti transaksi (nota, faktur,

kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab, rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 37,50%, dan untuk pernyataan SISKEUDES meminimalisir praktik manipulasi pajak, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%. Data peran integritas keuangan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

2. Pengungkapan (*Full Disclosure*)

Tabel 3.5
Jawaban Responden Tentang Pengungkapan (*Full Disclosure*)

	Jawaban Responden									
	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P2.1	11	68,75	3	18,75	2	12,50	0	0	0	0
P2.2	3	18,75	8	50,00	5	31,25	0	0	0	0
P2.3	4	25,00	8	50,00	4	25,00	0	0	0	0
P2.4	5	31,25	8	50,00	3	18,75	0	0	0	0
P2.5	10	62,50	4	25,00	2	12,50	0	0	0	0
P2.6	9	56,25	5	31,25	2	12,50	0	0	0	0
P2.7	5	31,25	7	43,75	4	25,00	0	0	0	0

Sumber: Data primer yang diolah Maret 2019

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Berdasarkan tabel 3.5 yaitu deskripsi responden mengenai pengungkapan (*Full Disclosure*), untuk pernyataan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan sistem manual, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%, untuk pernyataan SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi

anggaran, neraca dll dalam *website* resmi, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan yang akurat, relevan dan terbaru (*up to date*), rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang mudah dipahami oleh publik, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang lengkap, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 62,50%, kemudian untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, dan untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan sistem untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik *input* maupun *posting*, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%. Data peran pengungkapan (*Full Disclosure*) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

3. Ketaatan Terhadap Peraturan

Tabel 3.6
Jawaban Responden Tentang Ketaatan Terhadap Peraturan

	Jawaban Responden									
	SS		S		N		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P3.1	2	12,50	8	50,00	6	37,50	0	0	0	0
P3.2	9	56,25	6	37,50	1	6,25	0	0	0	0
P3.3	2	12,50	8	50,00	5	31,25	1	6,25	0	0
P3.4	11	68,75	4	25,00	1	6,25	0	0	0	0

Sumber: Data primer yang diolah Maret 2019

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Berdasarkan tabel 3.6 yaitu deskripsi responden mengenai ketaatan terhadap peraturan, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, dan untuk pernyataan Desa Bogorejo selalu memperbaharui aplikasi SISKEUDES, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%. Data peran ketaatan terhadap peraturan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri,⁸⁶ Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang merupakan alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun

⁸⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3).

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.

Upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya penguatan desa dan sumber daya di desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan administrasi keuangan desa untuk menghadapi dana desa khususnya yang bersumber dari APBN baik melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi.

Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran telah mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016 dan dikelola oleh bapak Widodo Sunu selaku Sekertaris Desa yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diselenggarakan di aula pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran, yang diperuntukan untuk semua aparatur desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan oleh Desa Bogorejo merupakan versi terbaru yaitu versi 2.0 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 digunakan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBDes tahun anggaran 2019 diseluruh desa di Indonesia. Untuk penginputan Desa

Bogorejo menginput secara pribadi oleh Sekertaris Desa dan Desa Bogorejo juga telah mengirimkan *database* aplikasi sistem keuangan desa secara berkala baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Aplikasi sistem keuangan desa berjalan pada operating system windows dan dapat berjalan dengan baik pada windows XP, windows 7, windows 8, dan windows 10. sistem operasi komputer selain windows tidak dapat digunakan untuk implementasi aplikasi sistem keuangan desa. Berdasarkan hasil observasi Desa Bogorejo menggunakan sistem operasi windows terbaru yaitu versi 10. Sedangkan untuk perangkat keras komputer untuk penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini minimal Intel Celeron 1,5Ghz dengan memori RAM 1 Gb dan ruang hardisk kosong tersisa minimum 10 Gb, ini termasuk syarat minimum dan bila disediakan spesifikasi di atas standar tersebut lebih disarankan. Berdasarkan hasil observasi Desa Bogorejo menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi processor intel core I5 6600 3.3 Ghz, cache 6 MB, Harddisk WDC 2TB SATA3 64MB, RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x4), VGA Digital Alliance GeForce GTX 950 2GB DDR% 128 bit, Monitor AOC 22.

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dan observasi untuk pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo termasuk dalam kategori baik karena telah mengikuti standar penerapan mulai dari sistem yang digunakan yaitu aplikasi versi terbaru, perangkat keras yang digunakan sudah sesuai dengan standar penerapan, ketersediaan jaringan internet dan arus listrik yang memadai dan sumber daya

manusia sebagai pengelola yang cukup memadai karena ditunjang dengan pelatihan simulasi sebelum penerapan aplikasi.

Berdasarkan hasil kuesinoer yang didapatkan ada beberapa hambatan dan kendala dalam pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa yang dirasakan oleh Desa Bogorejo yaitu pergantian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengakibatkan beberapa perubahan pasal yang diberlakukan mulai tanggal 01 januari 2019, selanjutnya mengenai proses posting APBDes yang masih ditangani admin (BPMD) yang seharusnya posting APBDes sudah bisa dilakukan oleh perangkat desa (*user*). Harapan sekertaris desa selaku kordinator dan operator aplikasi sistem keuangan desa, aplikasi SISKEUDES lebih dikembangkan dengan pembaharuan versi yang diikuti dengan *fitur-fitur* terbarunya.

Kaur Keuangan Desa Bogorejo sangat optimis dengan aplikasi sistem keuangan desa yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Nyoman Purnomo sebagai Kaur Keuangan Desa Bogorejo megatakan, ketika aplikasi keuangan desa telah direkomendasikan, perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang *intens* sebagai *stimulus* untuk menjaga kearah penggunaan seutuhnya, artinya tidak hanya sebatas sosialisasi dan ditingkatkan kembali untuk keamanan terkait dengan data aplikasi yang rentan terkena virus.

B. Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa

Adanya aplikasi keuangan tentunya sangat berperan penting dalam berbagai hal, salah satunya yaitu dalam pengelolaan keuangan, adanya aplikasi keuangan sendiri memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola keuangan dengan tujuan menghasilkan *output* yang relevan sehingga mampu meminimalisir adanya masalah yang mungkin sering terjadi seperti keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam laporan keuangan.

Adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) akan memperoleh kemudahan dalam membuat analisa terkait langkah yang harus dilakukan periode selanjutnya dalam pembangunan desa. aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) akan memberikan kemudahan dalam mengatur *financial*, tidak hanya secara spesifik namun secara menyeluruh sehingga akan menjadikan keuangan desa semakin stabil. Selain itu aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat berperan dalam membantu Kepala Desa menjaga aset desa, karena semua kekayaan desa dapat direkam dalam aplikasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan Kepala Desa sebagai penanggungjawab.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, jika hal ini dikaitkan dengan peran aplikasi sistem keuangan dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Bogorejo, maka prinsip akuntabilitas dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sudah terpenuhi, sesuai dengan hasil kuesioner yang diperoleh peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa aplikasi sistem keuangan desa

ini memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, dengan tersedianya informasi laporan pertanggungjawaban dan *output* lainnya yang mudah dipahami oleh publik dan masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan *output* yang dihasilkan aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Selain itu responden setuju bahwa aplikasi SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru (*up to date*).

Berikut adalah analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa berdasarkan tiga indikator yaitu:

1. Analisis Integritas Keuangan

Pengelolaan keuangan desa harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi karena akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang *agent* yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan alam. Tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah SWT memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah At-Taubah ayat 119.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahan

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah :119)⁸⁷

Bersifat jujur dalam segala hal, menyampaikan informasi dengan benar kepada publik, konsisten melakukannya sehingga terbangun budaya integritas, sehingga harapannya dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan dan dapat memberikan peran untuk meminimalisir tindakan kecurangan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki jiwa integritas dan kejujuran dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Berikut analisis peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, dengan menggunakan indikator integritas keuangan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES apakah mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini responden berjumlah 16 orang, dengan jumlah pernyataan 4, dan dengan jumlah skala 5, diketahui total skor integritas keuangan sebesar 250. Hasil tersebut kemudian penulis masukkan kedalam garis kontinum, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2012), h. 206.

a. Diketahui

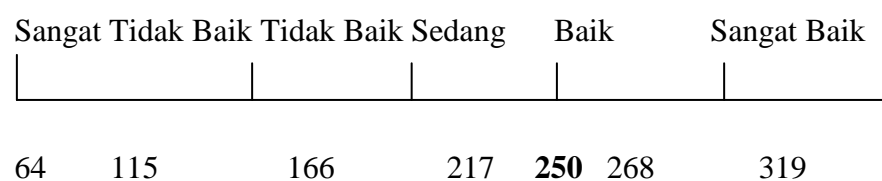
- 1) Jumlah Responden = 16
- 2) Jumlah Pernyataan = 4
- 3) Jumlah Skala = 5
- 4) Total Skor = 250

b. Perhitungan

- 1) Nilai Maksimum = Skala Terbesar x Pernyataan x Responden
 $= 5 \times 4 \times 16$
 $= 320$
- 2) Nilai Minimum = Skala Terkecil x Pernyataan x Responden
 $= 1 \times 4 \times 16$
 $= 64$
- 3) Jarak Interval = (Nilai Maks – Nilai Minm) : Jumlah Skala
 $= (320 - 64) : 5$
 $= 51$
- 4) Persentase Skor = (Total Skor : Nilai Maks) x 100
 $= (250 : 320) \times 100$
 $= 78,12\%$

5) Garis Kontinum

Gambar 4.1
Garis Kontinum Integritas Keuangan



Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah 319. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 250 atau 78,12% dari skor ideal yaitu 320. Dengan demikian integritas keuangan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa berada pada kategori baik.

Kategori baik maksudnya integritas keuangan dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam kategori mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Dengan kata lain integritas keuangan dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian yaitu harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya, serta menyajikan informasi secara terbuka. Namun aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini hanya sebatas sistem yang dikendalikan oleh sumber daya manusia sebagai pengelola, artinya kejujuran kembali pada sumber daya manusianya, jadi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) hanya sarana untuk meminimalisir kecurangan dan sepenuhnya kembali ke sumber daya manusianya.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Parno sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo, Beliau mengatakan bahwa adanya aplikasi sistem keuangan desa ini benar mampu meminimalisir adanya kecurangan dibandingkan dengan penggunaan sistem manual yaitu sering terjadinya selisih antara realisasi anggaran dan pencatatan dalam laporan

keuangan, ada dua kemungkinan perselisihan tersebut terjadi yaitu antara disengaja dan tidak disengaja, tidak disengaja maksudnya jika pencatat sudah berusaha jujur dan maksimal menyajikan, namun kembali ke fitrah manusia yaitu tidak lepas dari kesalahan, tetapi itu bisa diminimalisir dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari penelitian, untuk pernyataan SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 56,25%, kemudian pernyataan SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 62,50%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu melampirkan bukti transaksi (nota, faktur, kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab, rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 37,50%, dan untuk pernyataan SISKEUDES meminimalisir praktik manipulasi pajak, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%.

2. Analisis Pengungkapan (*Full Disclosure*)

Akuntansi syariah menurut Baydoun dan Willet mempunyai dua prinsip esensial yaitu *full disclosure* dan *social accountability* yang diturunkan dari pertanggungjawaban menurut syariah setiap muslim dan kepada masyarakat secara umum. Berdasar prinsip tersebut maka kerangka pengungkapan (*disclosure framework*) barat dipandang oleh Baydoun dan Willet (1994) sangat terbatas untuk tujuan akuntabilitas. Hal ini disebabkan

disclosure terbatas pada laporan keuangan yang berdasarkan *historical cost* serta mengabaikan hubungan potensial entitas dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Baydoun dan Willet berargumentasi bahwa fokus akuntansi syariah berbeda dengan fokus pemilik entitas dalam akuntansi barat sehingga prinsip *full disclosure* mutlak dibutuhkan oleh akuntansi syariah.⁸⁸

Akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil dan transparansi. Menurut Abu-Tapanjeh akuntabilitas yang paling utama adalah kepada Allah SWT, konsep dasar akuntabilitas islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu pengungkapan fakta keuangan harus menggambarkan informasi yang benar, akurat, tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan serta mudah dipahami dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip kebenaran. akuntansi syariah erat hubungannya dengan perkara pengukuran dan pengakuan, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), akuntansi syariah yang digunakan pemerintah desa berperan dalam menyediakan informasi, melakukan pengukuran, mengakui dan melaporkan transaksi sebenar-benarnya.

Berikut analisis peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, dengan menggunakan indikator pengungkapan (*full disclosure*) dengan penggunaan aplikasi

⁸⁸Baydoun, Willet, "Islamic Corporate Reports". Jurnal ABACUS, Vol. 36 No.1 (2000), h. 81.

SISKEUDES apakah mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden, penulis terlebih dahulu melakukan wawancara singkat kepada bapak Widodo Sunu selaku Sekertaris Desa sekaligus operator aplikasi sistem keuangan desa, kemudian melanjutkan penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden. Dalam penelitian ini responden berjumlah 16 orang, dengan jumlah 7 pernyataan , dan dengan jumlah skala 5, diketahui total skor sebesar 473. Hasil tersebut kemudian penulis masukkan kedalam garis kontinum, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Diketahui

- 1) Jumlah Responden = 16
- 2) Jumlah Pernyataan = 7
- 3) Jumlah Skala = 5
- 4) Total Skor = 473

b. Perhitungan

- 1) Nilai Maksimum = Skala Terbesar x Pernyataan x Responden

$$= 5 \times 7 \times 16$$

$$= 560$$
- 2) Nilai Minimum = Skala Terkecil x Pernyataan x Responden

$$= 1 \times 7 \times 16$$

$$= 112$$
- 3) Jarak Interval = (Nilai Maks – Nilai Minm) : Jumlah Skala

$$= (560 - 112) : 5$$

$$= 89$$

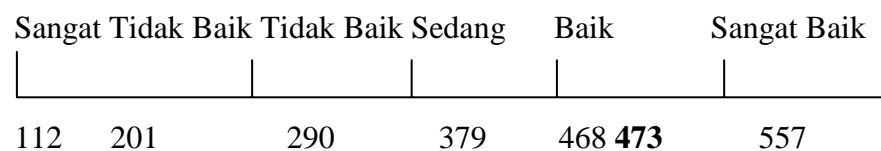
$$4) \text{ Persentase Skor} = (\text{Total Skor} : \text{Nilai Maks}) \times 100$$

$$= (473 : 560) \times 100$$

$$= 84,46\%$$

5) Garis Kontinum

Gambar 4.2
Garis Kontinum Pengungkapan



Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah 557. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 473 atau 84,46% dari skor ideal yaitu 560. Dengan demikian pengungkapan dengan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa berada pada kategori baik.

Kategori baik maksudnya pengungkapan dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam kategori mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengungkapan (*full disclosure*) yaitu mampu mendesain dan menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan relevan serta mudah dipahami oleh publik, sehingga membuat

para pengguna laporan keuangan paham dan tidak salah penafsiran terhadap laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan (*full disclosure*) dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan. *Full disclosure* yang dikehendaki adalah mengungkapkan informasi akuntansi dengan benar dan tepat sesuai dengan prinsip syariah, tidak saja pada sisi pertanggungjawaban sosial melainkan pada sisi perlakuan terhadap pos-pos yang ada dalam informasi akuntansi. Dengan demikian laporan keuangan tidak lagi berorientasikan pada memaksimalkan laba, akan tetapi laporan keuangan yang membawa pesan moral dan menstimulasi perilaku etis, adil terhadap semua pihak dan memiliki keseimbangan laporan keuangan sesuai konsep akuntansi.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Parno sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo, beliau mengatakan bahwa adanya aplikasi sistem keuangan desa ini benar mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan lengkap, dengan proses penyelesaian yang lebih efektif dan efisien karena dimudahkan dengan pengklasifikasian transaksi yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem manual, sehingga *ouput* yang dihasilkan aplikasi SISKEUDES ini lebih mudah dipahami oleh publik.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari penelitian, untuk pernyataan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan sistem manual, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%, untuk pernyataan

SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca dll dalam *website* resmi, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan yang akurat, relevan dan terbaru (*up to date*), rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang mudah dipahami oleh publik, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang lengkap, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 62,50%, kemudian untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, dan untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan sistem untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik *input* maupun *posting*, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%.

3. Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan

Dalam pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah

ditetapkan sebelumnya seperti, peraturan perundang-undangan, Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Harapannya pengelolaan keuangan desa dijalankan dengan amanah dengan melalui sistem yang dijalankan dengan benar, jelas, informatif serta tidak ada unsur manipulasi sehingga berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

Berikut analisis peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, dengan menggunakan indikator ketaatan terhadap peraturan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES apakah mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini responden berjumlah 16 orang, dengan jumlah 4 pernyataan, dan dengan jumlah skala 5, diketahui total skor ketaatan terhadap peraturan sebesar 265. Hasil tersebut kemudian penulis masukkan kedalam garis kontinum, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Diketahui

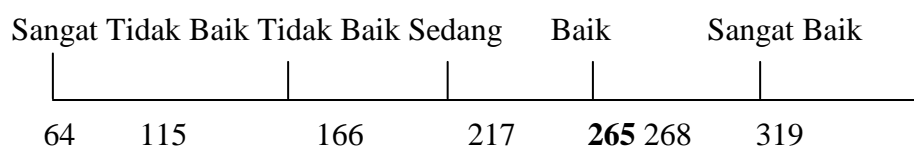
- | | |
|----------------------|-------|
| 1) Jumlah Responden | = 16 |
| 2) Jumlah Pernyataan | = 4 |
| 3) Jumlah Skala | = 5 |
| 4) Total Skor | = 265 |

b. Perhitungan

- | | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) Nilai Maksimum | = Skala Terbesar x Pernyataan x Responden |
|-------------------|-------------------------------------------|

- $$= 5 \times 4 \times 16$$
- $$= 320$$
- 2) Nilai Minimum = Skala Terkecil x Pernyataan x Responden
- $$= 1 \times 4 \times 16$$
- $$= 64$$
- 3) Jarak Interval = (Nilai Maks – Nilai Minm) : Jumlah Skala
- $$= (320 - 64) : 5$$
- $$= 51$$
- 4) Persentase Skor = (Total Skor : Nilai Maks) x 100
- $$= (265 : 320) \times 100$$
- $$= 82,81\%$$
- 5) Garis Kontinum

Gambar 4.3
Garis Kontinum Ketaatan Terhadap Peraturan



Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah 319. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 265 atau 82,81% dari skor ideal yaitu 320. Dengan demikian ketaatan terhadap peraturan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa berada pada kategori baik.

Kategori baik maksudnya ketaatan terhadap peraturan dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam kategori mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, karena akuntansi dan pelaporan keuangan yang dihasilkan aplikasi sistem keuangan desa menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan berbagai bentuk laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran (SPP), surat setoran pajak (SSP), dan dokumen lainnya.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Parno sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo, Beliau mengatakan bahwa benar adanya aplikasi sistem keuangan desa ini memiliki kelebihan yaitu sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu dalam penyajian laporan keuangan, *output* atau laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi sistem keuangan desa ini menyajikan laporan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat dari penelitian, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, selanjutnya untuk

pernyataan SISKEUDES mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, dan untuk pernyataan Desa Bogorejo selalu memperbaharui aplikasi SISKEUDES, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%.

C. Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dibangun di atas paradigma syariah (*sharia paradigm*). Dalam KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dijelaskan bahwa akuntansi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual yakni *falah*.

Paradigma syariah menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas ekonomi. Dengan paradigma ini, akan membentuk integritas yang dapat membantu terbentuknya karakter tatakelola keuangan yang baik.

Tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat materi adalah pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat spirit adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat *mutually inclusive* yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada dalam satu kesatuan. Triyuwono berargumen bahwa akuntansi syariah

merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders* dan alam (akuntabilitas horizontal). Mengenai informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi syariah, Triyuwono berpendapat perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual, dan politik bisnis.⁸⁹

Mohammad R. Taheri dalam artikelnya yang berjudul *The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards Settings*, berpendapat bahwa kebijakan akuntansi untuk akuntansi model Islami akan lebih berorientasi nilai (*value-oriented*). Hal ini didasarkan adanya konsep umum akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan konsep tersebut, artinya dalam membuat laporan keuangan harus ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara, manajemen dan masyarakat.

Harahap mengusulkan struktur teori konseptual akuntansi syariah yang memuat tujuan akuntansi syariah. Tujuan tersebut yaitu tujuan muamalah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar, keadilan dan kebenaran), maslahat sosial, kerjasama, menghapus riba, mendorong zakat, dan menghindari riba.⁹⁰

Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas perspektif

⁸⁹Triyuwono, Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 214.

⁹⁰Harahap, Sofyan Safri, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam (Jakarta: Quantum Harahap, 2001)

syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip prinsip syariah.

Laporan keuangan yang berbasiskan akuntansi syariah mempunyai ruang dan peluang tersendiri untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara horisontal maupun vertikal, karena diikat oleh aturan baku akuntansi syariah dan juga diikat oleh aturan-aturan agama sebagai basis dan ruh dari sifat akuntansi syariah itu sendiri. Jelasnya, akuntansi syariah mempunyai kelebihan keterpercayaan dan akuntabel dalam penyampaian informasi dan akuntabilitas keakuratannya sehingga keputusan maupun kebijakan yang akan diambil bisa benar-benar dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi sebenarnya dibandingkan dengan akuntansi konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, tentang analisis peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam studi pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian untuk pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Bogorjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah melakukan proses pertanggungjawabannya dengan relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Desa Bogorejo juga telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengelolaan sudah baik.
2. Penelitian untuk kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Bogorejo setelah penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat membawa perubahan yang cukup baik di Desa Bogorejo, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, dengan penerapan aplikasi sistem

keuangan desa mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Lembaga Pemerintah Desa Bogorejo

- a. Desa Bogorejo diharapkan lebih mengoptimalkan proses pengerjaan, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penginputan dan proses pelaporan dalam aplikasi sistem keuangan desa untuk mengurangi terjadinya pemberian informasi yang tidak relevan. Sehingga diharapkan pemerintah desa mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penginputan aplikasi sistem keuangan desa.
- b. Desa Bogorejo sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih optimal dan Desa Bogorejo sebaiknya mengikutsertakan masyarakat mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnnya seperti tingkat transparansi dan sebagainya agar teranalisis dengan sempurna.
- b. Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan refrensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Akhmad Basori, Robertus G. Megantoro, Arif Irwanto. *Buku Kerja - Sistem Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016.
- Beratha, I Nyoman. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982.
- BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2012.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghony, M Djunaid, Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Idat. *Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia*. Bandung: Jemmars, 2003.
- J.B. Gharthey. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- LAN dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN, 2015.
- Iwood S. *Manajemen Operasi dan Produksi Modern*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2003.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.

- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004.
- Noer Saleh, Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 2010.
- Penny Kusumastuti. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Qhardawi, Yusuf. *Fikuh Zakah Muassasat Ar-risala* (cet II) terjemahan Didin Hafifudin. Bairut Libanon: 1408H/1998.
- R. Bintaro. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Romney, Marshal B, Paul John Steinbart. *Sistem Informasi Akuntansi* (ed XIII). Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Sagala Syaiful. *Human Capital*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- . *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R & D* (cet. XV). Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Tasmara Toto. *Spiritual Centered Leadership* (kepimpinan berbaris spiritual). Jakarta: Gema Insani, 2006.

Triyuwono. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Wiratna Sujarweni. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Pustaka Baru, 2015.

Yuatisia Visi. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visi Media, 2016.

Penelitian Terdahulu:

Candra Kusuma, et. al. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6 (Desember 2015).

Eko Febri Lusiono, Suharman. “Analisis Penerimaan Aplikasi SISKEUDES di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017),

Hanifah, Praptoyo. “Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)”. *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi*. No. 4, Vol. 8, (Desember 2015).

Khan, Muhammad Akram. “The Role of Government in the Economy”. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2012).

Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muclis, Reski Amalia Putri. “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2018).

Rosalina, Santi. “Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi Berdasarkan *Locus Of Control* dan *Gender*”. (Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya, 2010).

Septiani, Aditya. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang”. (Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes)”. *Jurnal Ilmu dan riset akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, Vol. 4 No. 8 (November 2015).

Dokumen:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 212 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6.

Wawancara:

Widodo Sunu, wawancara dengan Sekertaris Desa Bogorejo (Operator SISKEUDES), Kantor Kepala Desa, Pesawaran, 25 Februari 2019.

Nyoman Purnomo, wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bogorejo, Pesawaran, 25 Februari 2019.

Internet:

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (12 Januari 2019).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (On-Line), tersedia di: https://kominform.go.id/content/detail/9658/bpkp-konsisten-mengawal-keuangan-desa/0/artikel_gpr (06 Februari 2019).

Optimalisasi Office Channeling Bank Syariah. (On-Line), Tersedia di: <https://agustianto.wordpress.com/2008/01/05/optimalisasi-office-channeling-bank-syariah/> (05 Februari 2019).

LAMPIRAN





Laporan Keuangan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI

PEMBUKUAN KEUANGAN DESA

☒ Laporan Realisasi Anggaran Desa
☐ Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
☐ Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
☐ Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
☐ Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
☐ Laporan Realisasi APBDes Semesteran
☐ Laporan Kekayaan Milik Desa
☐ Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a
☐ Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b
☐ Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
☐ Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225

Tanggal: 01/01/2019 s.d 31/12/2019
 Kecamatan: 01 KECAMATAN MARGASARI
 Desa: 01/2001 PEMERINTAH DESA SIMULASI

APBDes: ☐ Anggaran Perubahan
 Footer: ><YZ. 14 Oktober 2018

Tampilan Menu Aplikasi SISKEUDES

KUESIONER

Pengelolaan Aplikasi SISKEUDES

A. Data Umum Desa

1. Desa : Bogorejo
2. Kecamatan : Gedong Tataan
3. Kabupaten : Pesawaran
4. Jumlah Perangkat Desa :
5. Profil Perangkat Desa

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir (pilih salah satu)						Pernah mengikuti sosialisasi SISKEUDES	
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2/S3	Ya	Tidak
1	Kepala Desa								
2	Sekretaris Desa								
3	Kaur Keuangan								
4	Bendahara Desa								
5	Operator siskeudes								

Narasumber pelatihan yang

Pernah diikuti berasal dari : BPKP ☐ Pemda ☐

(pilihan bisa lebih dari satu) Kemendagri ☐ Universitas ☐

B. Pengelolaan Aplikasi SISKEUDES (*pilihan diberi tanda cheklist*)

1. Sejak kapan menggunakan Aplikasi SISKEUDES? : ☐ 2015 ☐ 2016 ☐ 2017
2. Rilis Aplikasi SISKEUDES yang Digunakan : ☐ 1.01 ☐ 1.02 ☐ 1.03
☐ 1.04 ☐ 1.05 ☐ 1.06
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
 - a. Ketersediaan listrik di desa : ☐ Memadai ☐ Tidak Memadai
 - b. Ketersediaan sarana computer : ☐ Memadai ☐ Tidak Memadai
4. Desa telah menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk menginput ☐ Perencanaan ☐ Penganggaran
 Dokumen pengolahan keuangan : ☐ Pelaksanaan ☐ Pelaporan
 (*pilihan bisa lebih dari satu*)
5. Desa telah mengirimkan database Aplikasi SISKEUDES secara berkala : ☐ Sudah ☐ Belum
 Ke kecamatan atau kabupaten/kota
6. Kemampuan Sekdes Selaku Kordinator : M☐dai Tid☐Memadai
7. Kemampuan Kaur Keuangan : ☐ Memadai ☐ Tidak Memadai
8. Kemampuan Bendahara Desa : ☐ Memadai ☐ Tidak Memadai
9. Kemampuan Operator Siskeudes : ☐ Memadai ☐ Tidak Memadai
10. Pihak yang menginput dalam Siskeudes : ☐ Sendiri ☐ Kecamatan
☐ Pendamping ☐ Lainnya

C. Hambatan dan Komentar Tentang Aplikasi SISKEUDES

1. Hambatan dan kendala pengelolaan aplikasi SISKEUDES?

Jawab :

2. Perbedaan setelah dan sebelum penggunaan aplikasi SISKEUDES?

Jawab :

3. Komentar untuk aplikasi SISKEUDES?

Jawab :

Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

NO	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
Integritas Keuangan						
1	SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa.					
2	SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat tranparansi laporan keuangan.					
3	SISKEUDES mampu melampirkan bukti transaksi (nota, faktur, kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab.					
4	SISKEUDES meminimalisir praktik manipulasi pajak.					
Pengungkapan						
5	SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan sistem manual.					
6	SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca dll dalam website resmi.					
7	SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan yang akurat, relevan dan terbaru (up to date)					
8	SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang mudah dipahami oleh publik.					

9	SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang lengkap.					
10	SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.					
11	SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan sistem untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik <i>input</i> maupun <i>posting</i> .					
Ketaatan Terhadap Peraturan						
12	SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana.					
13	SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak.					
14	SISKEUDES mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.					
15	Desa Bogorejo selalu memperbaharui aplikasi SISKEUDES.					

Your trial period for SPSS for Windows will expire in 14 days.

CORRELATIONS

/VARIABLES=P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 TOTAL

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Notes

Output Created	10-Apr-2019 04:53:50	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	16
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 TOTAL /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00.032
	Elapsed Time	00:00:00.063

[DataSet0]

Correlations

		P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	TOTAL
P1.1	Pearson Correlation	1	.291	.348	.391	.643**
	Sig. (2-tailed)		.275	.186	.134	.007
	N	16	16	16	16	16
P1.2	Pearson Correlation	.291	1	.268	.700**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.275		.316	.003	.001
	N	16	16	16	16	16
P1.3	Pearson Correlation	.348	.268	1	.408	.717**
	Sig. (2-tailed)	.186	.316		.117	.002
	N	16	16	16	16	16
P1.4	Pearson Correlation	.391	.700**	.408	1	.858**
	Sig. (2-tailed)	.134	.003	.117		.000
	N	16	16	16	16	16
TOTAL	Pearson Correlation	.643**	.741**	.717**	.858**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.001	.002	.000	
	N	16	16	16	16	16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


```

RELIABILITY
/VARIABLES=P1.1 P1.2 P1.3 P1.4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Notes		
Output Created		10-Apr-2019 04:54:16
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	16
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00.015
	Elapsed Time	00:00:00.015

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	16	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	16	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.721	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1.1	11.31	3.563	.436	.702
P1.2	11.75	3.267	.566	.639
P1.3	11.56	2.929	.431	.717
P1.4	12.25	2.333	.666	.552

Your trial period for SPSS for Windows will expire in 14 days.

CORRELATIONS

/VARIABLES=P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 TOTAL

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Notes		
Output Created		10-Apr-2019 04:59:24
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	16
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 TOTAL /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.047
	Elapsed Time	00:00:00.031

Correlations

		P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	TOTAL
P2.1	Pearson Correlation	1	.016	.251	.112	.941**	.512*	.289	.632**
	Sig. (2-tailed)		.953	.348	.681	.000	.043	.277	.009
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
P2.2	Pearson Correlation	.016	1	.635**	.806**	-.127	.112	.736**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.953		.008	.000	.639	.681	.001	.007
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
P2.3	Pearson Correlation	.251	.635**	1	.889**	.250	.251	.946**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.348	.008		.000	.350	.348	.000	.000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
P2.4	Pearson Correlation	.112	.806**	.889**	1	.000	.143	.946**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.681	.000	.000		1.000	.596	.000	.000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
P2.5	Pearson Correlation	.941**	-.127	.250	.000	1	.439	.177	.543*
	Sig. (2-tailed)	.000	.639	.350	1.000		.089	.511	.030
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
P2.6	Pearson Correlation	.512*	.112	.251	.143	.439	1	.304	.559*
	Sig. (2-tailed)	.043	.681	.348	.596	.089		.252	.024
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
P2.7	Pearson Correlation	.289	.736**	.946**	.946**	.177	.304	1	.895**
	Sig. (2-tailed)	.277	.001	.000	.000	.511	.252		.000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL	Pearson Correlation	.632**	.645**	.859**	.792**	.543*	.559*	.895**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.007	.000	.000	.030	.024	.000	
	N	16	16	16	16	16	16	16	16

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

[DataSet0]

RELIABILITY

/VARIABLES=P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Notes

Output Created		10-Apr-2019 04:59:56
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	16
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00.000
	Elapsed Time	00:00:00.000

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	16	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	16	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P2.1	25.00	10.267	.486	.823
P2.2	25.69	10.229	.504	.820
P2.3	25.56	9.062	.788	.774
P2.4	25.44	9.462	.697	.789
P2.5	25.06	10.729	.376	.840
P2.6	25.12	10.650	.397	.837
P2.7	25.50	8.667	.836	.763